

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM MENOPTIMALKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

REGIONAL AUTONOMY OBLIGATION IN OPTIMIZING THE EDUCATION FUNDING IN WONOGIRI REGENCY

Dhanu Anggita

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

dhanuanggita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah dalam mengembangkan pembiayaan pendidikan, serta faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah pegawai Dinas Pendidikan, pegawai DPPKAD, dan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan, kantor DPPKAD, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Wonogiri masih tergantung pada dana perimbangan dari pusat. Setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan, namun diikuti juga peningkatan belanja untuk anggaran pendidikan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri selalu mengupayakan cara untuk selalu meningkatkan anggaran pendidikan di setiap tahunnya. Karena di Kabupaten Wonogiri, pendidikan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan strategis. Semua instansi sudah mendukung renstra tersebut, namun banyaknya kendala yang dihadapi, membuat rencana tersebut sedikit terhambat. Sepertihalnya lemahnya perkembangan PAD kabupaten Wonogiri, menjadi salah satu faktor penghambat. Namun Pemerintah Kabupaten Wonogiri selalu berusaha mengoptimalkan supaya PAD di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan dengan merenovasi tempat wisata, mengoptimalkan Sumber Daya Alam yang dimiliki, dan memberi pelayanan yang mudah dalam penarikan pajak.

Kata kunci: otonomi daerah, pembiayaan pendidikan, Kabupaten Wonogiri

Abstract

This study aims to identify the regional autonomy obligation in optimizing the education funding, and also the influencing and inhibiting factors in optimizing the education funding in Wonogiri Regency.

This study used descriptive qualitative approach and was conducted in Office for Management of Regional Revenue, Finance, and Assets (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah/DPPKAD), and Education Board of Wonogiri Regency. The research subjects are the employees of Education Office, employees of Office for Management of Regional Revenue, Finance, and Assets (DPPKAD), and the administrators of Education Board of Wonogiri Regency. In this research, data collecting techniques used were observation, interview, and study documentation. Meanwhile, the data validity was tested by using source and technique triangulation. Furthermore, from the data obtained, the researcher also conducted data reduction, data display, and conclusion drawing.

The research result shows that the budget in Wonogiri Regency still depends on the fiscal balance fund from the central government. From the local regulation of the local government

budget (Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perda APBD) of Wonogiri Regency, each year it has increase in the revenue, but also followed by the increase in the expenditure of education budget. Wonogiri Regency government also always strives the attempts for increasing the education budget in each year. Education sector becomes the main priority in both long term and short term strategic development plan in Wonogiri Regency. All of the institutions support that strategic development plan, despite several numbers of obstacle faced by the government that makes the plan is a bit obstructed. The low rate of the Local Own-source Revenue in Wonogiri Regency becomes one of the inhibiting factors; however, Wonogiri Regency government always attempts to make the Local Own-source Revenue increases in each year. One of the attempts realized is by renovating the tourism places and optimizing the natural resources in Wonogiri Regency, and also by facilitating the ease in the service of tax collection.

Keywords: *regional autonomy, education funding, Wonogiri Regency.*

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia terus mengalami perbaikan dan pengembangan khususnya dalam pemerataan. Pemerataan dalam pendidikan menjadi salah satu masalah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan Kebijakan Desentralisasi. Pengaturan perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah merupakan bentuk dari kebijakan desentralisasi tersebut. Sehingga Pemerintah daerah diberikan otoritas untuk mengatur dan mengelola pendidikan secara mandiri. Dasar dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah UU RI No. 22 Tahun 1999 (Sekarang UU RI No. 12 Tahun 2008), kemudian disusul dengan PP No. 25 Tahun 2000 mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah pusat untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang berlebih dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan secara mandiri. Desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Menurut Koirudin (2005:1) Dalam desentralisasi terkandung semangat demokrasi untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebuah pembangunan. Sehingga konsep desentralisasi sangat cocok diterapkan di negara demokrasi seperti di

Indonesia. Salah satu tujuan dari kebijakan otonomi adalah pengembangan biaya pendidikan.

Masalah pembiayaan daerah sudah jelas teratur dalam UU RI No. 3 Tahun 2004 mengatur berbagai hal yang terkait dengan proporsi, distribusi, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dari masalah tersebut maka timbul suatu masalah terkait kebijakan otonomi daerah dalam menangani keuangan, khususnya keuangan pendidikan. Kebijakan otonomi daerah dalam menetapkan anggaran pendidikan harus terbebas dari faktor apapun. Yang perlu dilihat dan dijadikan pertimbangan hanyalah keadaan yang sesungguhnya, dan apa saja yang harus segera diperbaiki. Sehingga Pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan Kabupaten/Kota harus mampu menguasai keadaan di lapangan, dan wajib mengetahui apa saja kekurangan dan perlu dibenahi dari bidang pendidikan. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota harus memiliki laporan mengenai masalah di setiap satuan pendidikan dan perlu merumuskan anggaran biaya yang

dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang ada.

Dengan mengacu pada standar yang dibuat oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus bisa menentukan alokasi anggaran untuk satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Pasalnya selama ini Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan masih bersifat *Top Down* yaitu menunggu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di atasnya. Mereka belum mampu untuk mengembangkan kebijakan yang dikeluarkan dari pusat yang disesuaikan dengan masalah yang ada di tiap daerah. Menurut data statistik dari Badan Pusat statistik, sekitar 50% masyarakat Kabupaten Wonogiri adalah petani. Hal tersebut jelas memengaruhi besarnya anggaran untuk bidang pendidikan. Sehingga pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak bisa berbuat banyak seperti apa yang di wacanakan oleh pemerintah pusat yang dituangkan dalam Undang-undang otonomi daerah. Masalah tersebut menyebabkan lambatnya mobilitas satuan pendidikan. Sekolah masih banyak mengandalkan bantuan dari pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengembangkan kualitas sekolahnya. Selain itu sekolah masih memungut biaya pembangunan dari orangtua siswa, dan itu sangat bertentangan dengan tujuan diadakannya BOS oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan masalah tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai: Kebijakan Desentralisasi dalam Mengembangkan Biaya Pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Mei 2016. Penelitian ini dilaksanakan di tiga instansi Pemerintahan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Kantor DPPKAD Kabupaten Wonogiri, Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan , Kabupaten Wonogiri.

Subyek Penelitian

Subjek dari penelitian adalah: 1) pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, 2) pegawai DPPKAD Kabupaten Wonogiri, 3) pejabat Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri.

Prosedur

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sebelum di lapangan, saat di lapangan dan sesudah di lapangan. *Pertama*, sebelum di lapangan peneliti menyelesaikan proposal dan membuat surat izin pra observasi. *Kedua*, peneliti melakukan pra observasi, menyelesaikan perijinan penelitian dan

mengambil data di lapangan. *Ketiga*, setelah penelitian di lapangan selesai peneliti melanjutkan mengolah data.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan peneliti berbentuk pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

Suharsimi Arikunto (2002: 101) berpendapat teknik pengumpulan data adalah “alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi menurut Burhan Bungin (2010: 115) mengatakan observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan indera lainnya.

Metode Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono, 2013: 317).

Metode Dokumentasi menurut Sugiyono (2013: 329) berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Wonogiri

Dasar dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah UU RI No. 22 Tahun 1999 (Sekarang UU RI No. 12 Tahun 2008), kemudian disusul dengan PP No. 25 Tahun 2000 yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah pusat untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang berlebih dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan secara mandiri. Desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Begitu pula pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menerapkan kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah saling bekerja sama untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan.

Dalam menentukan suatu kebijakan pendidikan selalu dilakukan koordinasi antara berbagai lembaga, diantaranya DPPKAD, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. Dewan pendidikan posisinya

memberikan cara, pendapat, dan pemikiran kaitannya dengan bagaimana pendidikan di Kabupaten Wonogiri bisa maju. Selain itu masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan termasuk masyarakat di dalamnya.

Sehingga dalam hal ini untuk tercapainya otonomi bidang pendidikan tidak hanya diatur oleh satu instansi tetapi beberapa instansi yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kebijakan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Selain itu dibutuhkan dorongan dari kalangan masyarakat didalamnya.

2. Kondisi Keuangan di Kabupaten Wonogiri

Kondisi keuangan di Kabupaten Wonogiri tergolong belum stabil. Dimana pengeluaran yang dikeluarkan untuk dana pendidikan belum sesuai dengan UU yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendapatan Kabupaten Wonogiri masih di topang dari dana alokasi dan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Belanja yang dikeluarkan untuk dana pendidikan cukup banyak bahkan lebih dari lima puluh persen dari APBD. Namun dana yang dialokasikan untuk pendidikan membengkak untuk belanja pegawai. Sehingga meskipun dana untuk pendidikan terbilang besar namun sebagian besar dana tersebut terserap untuk belanja pegawai.

Dari aspek kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam tahun 2011-2015, secara rata-rata sekitar 66,29% realisasi pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan, kemudian 25,11% berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan 8,59 % berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Tabel tersebut juga menginformasikan dengan jelas bahwa kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang sangat rendah, dibanding sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Meskipun perkembangan pendapatan asli daerah masih sangat kecil, namun telah mengalami perubahan disetiap tahunnya. Karena 85% pendapatan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berupa dana perimbangan maupun dana alokasi.

3. Alokasi Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri

Dari analisis APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2013, 2014 dan 2015, alokasi dana pendidikan menempati peringkat pertama dari pada alokasi dana lainnya. Hal ini merupakan salah satu bukti perhatian pemerintah kabupaten Wonogiri terhadap pendidikan sangatlah

besar. Selain itu setiap tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Bentuk belanja yang tertera pada tabel termasuk pada belanja gaji pegawai. Dana tersebut merupakan total dana dari berbagai sumber, diantaranya dari dana bantuan Pemerintah Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. Rincian besaran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran Pendidikan Kabupaten Wonogiri

Th	Anggaran Pendidikan	APBD
2012	5.743.878.991	232.902.085.645,45
2013	18.522.030.355	355.092.983.500,00
2014	51.210.035.488	441.777.142.708,00
2015	72.669.865.438	524.469.500.118,00

(Sumber: Laporan Ringkasan APBD Kab. Wonogiri Tahun 2012-2015)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya dana yang dianggarkan untuk pendidikan semakin meningkat, bisa dikatakan peningkatan anggaran tersebut meningkat sangat drastis bisa dilihat perbandingan di tahun 2012 dan 2013 yang meningkat lebih dari 100% begitu pula ditahun 2014 yang juga meningkat lebih dari 100% hanya di tahun 2015 yang meningkat kurang dari 100%.

4. Faktor Pendorong Peningkatan Pembiayaan pendidikan di Kabupaten Wonogiri

Faktor pendorong meningkatnya pembiayaan pendidikan di kabupaten Wonogiri salah satunya dari gaji pegawai,

karena banyaknya pegawai negeri di kabupaten wonogiri membuat anggaran pendidikan semakin tinggi.

Semua instansi sudah sepakat mengenai pentingnya pendidikan bagi pembangunan daerah. Segala bentuk dukungan telah diberikan dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri sangat peduli dengan pendidikan.

5. Faktor Penghambat Peningkatan Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri

Pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan anak bangsa, maka dari itu kita harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendidikan diantaranya sumber daya pendidik, sarana prasarana dan system pendidikan yang mencakup delapan standard pendidikan. Dari faktor-faktor tersebut tidak lepas dari dana pendidikan yang dikeluarkan oleh Negara, semakin banyak dana yang dikeluarkan maka semakin terpenuhi pula kebutuhan pendidikan. Untuk itu pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan APBD, agar kebutuhan daerah khususnya di bidang pendidikan dapat terpenuhi. Tetapi pada kenyataannya di kabupaten wonogiri sendiri masih belum memanfaatkan

secara maksimal sumber daya yang ada di Kabupaten Wonogiri agar dapat menambah pendapatan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sektor pendidikan yang merupakan pilar utama dalam pembangunan Kabupaten Wonogiri kedepan hendaknya mendapat perhatian yang serius terutama dari segi pembiayaan pendidikan yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Untuk itu pemerintah dan semua *stakeholders* pendidikan harus proaktif dalam menciptakan pendidikan yang murah dan bermutu yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, telah memberikan peluang kepada Kabupaten Wonogiri untuk lebih meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan, ini berarti pemerintah mempunyai itikad baik memajukan pendidikan di daerah ini. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang melebihi 20% diharapkan kualitas pendidikan meningkat dan wajib belajar Sembilan tahun dapat dituntaskan.

Implementasi kebijakan Otonomi di Kabupaten Wonogiri sudah berjalan dengan baik. Meskipun belum bisa mencapai target yang diinginkan, namun rambu-rambu bahwa di Kabupaten Wonogiri mampu untuk mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Meskipun masih fokus di beberapa sektor, yang menjadi prioritas jangka pendek.

Sepertihalnya pada sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri sangat memperhatikan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di setiap tahunnya seperti yang tertera di APBD. Besarnya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah di sektor pendidikan saja yang mendukung, namun dari berbagai instansi lain sampai pihak swasta juga menganggap bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Namun besarnya keinginan tersebut tidak disertai besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki kabupaten Wonogiri. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan harapan pemerintah tersebut.

Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonogiri diantaranya kurangnya pemanfaatan sumber daya di Wonogiri. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan sumber daya alam sebagai tempat pariwisata di Wonogiri. Banyak tempat yang memiliki prospek untuk dijadikan tempat wisata, namun kurangnya perhatian dari pemerintah

tempat tempat tersebut kurang maksimal. Faktor lain yang juga tak kalah penting untuk ditingkatkan adalah dalam bidang UMKM, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga belum memaksimalkan keberadaan UMKM. Sumber dunia usaha/ swasta akan menjadi dorongan tersendiri bagi peningkatan PAD. Dengan memaksimalkan potensi tersebut, bukan tidak mungkin jika Wonogiri bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam anggaran untuk pendidikan juga mengalami berbagai kendala. Besarnya belanja pegawai merupakan hal yang perlu diperhatikan tersendiri. Meskipun anggaran pendidikan tinggi, jika terjadi pembengkakan pada belanja pegawai, itu tidak akan berpengaruh pada pembangunan pendidikan. Pasalnya di Kabupaten Wonogiri, 70% dari anggaran pendidikan adalah belanja pegawai 20% belanja tetap, dan sisanya belanja pengembangan. Namun disisi lain dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maupun daerah (Provinsi), menjadi stimulus tersendiri dalam peningkatan anggaran pendidikan.

Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara membangun beberapa sector yang mampu meningkatkan pendapatan. Misalnya tempat wisata, usaha mikro kecil menengah dari masyarakat juga harus

ditingkatkan. Pemerintah juga harus memberikan perhatian dan dukungan. Pembenahan di sektor wisata misalnya, akan menarik wisatawan untuk datang ke Wonogiri, disamping itu memasukkan produk UMKM di daerah wisata juga akan meningkatkan pemasaran. Pemerintah akan memetik hasil yang positif. Secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

2. Kaitannya dengan pembiayaan pendidikan, harus ada perpaduan dan kesadaran antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Pihak pemerintah harus memprioritaskan anggaran pendidikan dengan cara memangkas anggaran lainnya. Kaitannya dengan pembangunan daerah harus dipusatkan pada sector yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dengan demikian akan berpengaruh pada besarnya anggaran pendidikan. Perpaduan untuk bersama membangun dan memberikan dorongan dari segi moral dan material sangat dibutuhkan. Penentuan besarnya biaya pendidikan seharusnya ditentukan oleh kemampuan dari walimurid, bukan dilihat dari tingkat popularitas sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Koirudin. (2005). *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format*

Masa Depan Otonom Menuju

Kemandirian Daerah. Malang:

Averroes Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*

Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.